

ABSTRAK

Penguasaan hak atas tanah adalah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Maka dari itu penguasaan hak atas tanah merupakan objek yang selalu diperebutkan oleh semua pihak, hal ini terjadi di Kampung Wates Kabupaten Majalengka yang mana permasalahan ini melibatkan dua belah pihak yaitu masyarakat dengan TNI-AU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan penguasaan hak atas di Kampung Wates Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian memakai studi kepustakaan terhadap data sekunder dibidang hukum meliputi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mencari peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Dan analisis data secara yuridis kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari peraturan-peraturan, yurisprudensi, dan literatur yang ada hubungannya dengan pembuktian saksi kemudian dipadukan dengan analisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi berfungsi untuk mengatur dan menentukan hubungan hukum, perbuatan hukum antara orang dengan tanah, ternyata pemerintah belum memaksimalkan perannya di Kampung Wates Kabupaten Majalengka, karena permasalahan penguasaan hak atas tanah yang terjadi Kampung Wates tersebut belum menemukan titik penyelesaian sampai saat ini sehingga tidak jelas kedudukan hukum bagi tanah tersebut, hal ini tentu belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c. UUPA. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan penguasaan hak atas tanah di Kampung Wates Kabupaten Majalengka telah dilakukan berbagai macam cara, namun upaya tersebut sampai saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan di Kampung Wates Kabupaten Majalengka.

Kata kunci : Penguasaan Hak Atas Tanah, Upaya Pemerintah, Kampung Wates.

ABSTRACT

The control of land rights consists of a series of authorities, obligations, and / or prohibitions for the holders of rights to do something about the land that is claimed. Something that is permissible, mandatory, or forbidden to do, which is the content of the tenure rights is the criterion or benchmark that distinguishes between the tenure rights stipulated in the land law. Therefore, mastery of land rights is an object that is always contested by all parties, this happens in Wates Village, Majalengka Regency, where this problem involves two parties, namely the community and the Air Force. This study aims to determine the legal position of the ownership of land rights in Wates Village according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and to determine the efforts made by the government to settle tenure rights above in Wates Village, Majalengka Regency

This study uses normative juridical methods, namely research using a literature study of secondary data in the field of law including primary legal materials and secondary legal materials. The research specification in this study is descriptive analysis that is looking for applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive law. And qualitative juridical data analysis, which is a way of analyzing data that reveals and retrieves truths obtained from regulations, jurisprudence, and literature related to witnesses' evidence then is combined with qualitative analysis and solutions are sought, and conclusions can be drawn.

The government as the highest institution functions to regulate and determine legal relations, legal actions between people and land, apparently the government has not maximized its role in Wates Village, Majalengka Regency, because the problem of control of land rights that occurred in Wates Village has not found a settlement point to date so it has not clearly the legal position for the land, this certainly does not comply with applicable regulations, namely Article 2 paragraph (2) letter b and letter c. UUPA. Efforts made by the government to resolve tenure of land rights in Wates Village in Majalengka Regency have been done in various ways, but these efforts have not been able to resolve the problems in Wates Village in Majalengka Regency.

Keywords: Control of Land Rights, Government Efforts, Wates Village.